

**KINERJA ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DI DESA CINEAM KECAMATAN CINEAM KABUPATEN
TASIKMALAYA**

Siti Pahla Nur Maulani¹, Rustandi², Ani Heryani³

¹²³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara
STIA Yppt Priatim Tasikmalaya

Email: sitipahlanurmaulani@gmail.com, rustandi29011962@gmail.com, aniheryani248@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cineam melalui pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Kajian penelitian difokuskan pada tingkat efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap BPD dalam menjalankan pemerintahan desa. Permasalahan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa meliputi keterbatasan waktu dan kurangnya komitmen diantara anggota, keterbatasan anggaran desa, serta persepsi masyarakat terhadap pemerataan program dan bantuan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen yang melibatkan anggota BPD, aparat desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah mengimplementasikan fungsi dan kewenangannya sesuai regulasi yang berlaku, namun kinerjanya belum sepenuhnya optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan kapasitas dan peran kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata kunci : Kinerja organisasi, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa.

ABSTRACT

This study discusses the organizational performance of the Village Consultative Body (BPD) in Cineam Village. The method used is a qualitative approach with a descriptive research design. This study focuses on analyzing the performance of the Village Consultative Body in terms of efficiency, effectiveness, fairness and responsiveness in the implementation of village governance. Problems faced by the Village Consultative Body include time constraints and lack of commitment among members, limited village budget, and community perceptions regarding the equitable distribution of programs and assistance. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation and document analysis, involving members of the Village Consultative Body, the village government, and the community. The results of the study indicate that the Village Consultative Body has carried out its functions and authorities in accordance with applicable regulations, but its performance has not been fully optimal. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity and institutional role of the Village Consultative Body on an ongoing basis to improve the quality of village governance.

Keywords : Organizational performance, Village Consultative Body, Village government

Latar Belakang Masalah

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berperan strategis dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang memiliki peran strategis dalam memperkuat praktik demokrasi di tingkat lokal. Keberadaan lembaga ini dimaksudkan untuk mewadahi aspirasi masyarakat desa serta memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berlangsung secara partisipatif dan transparan. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya menempatkan pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga membutuhkan lembaga perwakilan masyarakat yang mampu menjalankan fungsi permasyarakatan, penyaluran aspirasi, serta pengawasan dalam jalannya pemerintahan desa. Penilaian terhadap tata kelola pemerintahan desa tidak terlepas dari kinerja Badan Permasyarakatan Desa. Melalui pelaksanaan fungsi serta kewenangannya, Badan Permasyarakatan Desa berperan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program desa disusun serta dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Lembaga ini juga diharapkan mampu menjadi lembaga yang menjembatani hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga tercipta hubungan kerja yang seimbang dan saling menguatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kemampuan Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan. Badan Permasyarakatan Desa yang memiliki kinerja kelembagaan yang baik cenderung mampu mendorong pelaksanaan musyawarah desa yang lebih inklusif, menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa secara konstruktif. Sebaliknya, apabila kinerja kelembagaan tidak berjalan secara optimal, maka proses pemerintahan desa berpotensi kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, Desa Cineam merupakan salah satu desa yang secara aktif melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dalam berbagai proses strategis, seperti musyawarah desa, perencanaan pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan desa. Keterlibatan tersebut menuntut Badan Permasyarakatan Desa untuk mampu menjalankan peran dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjalin koordinasi yang efektif dengan pemerintah desa dan masyarakat. Dinamika hubungan antara Badan Permasyarakatan Desa, pemerintah desa, dan masyarakat di Desa Cineam menunjukkan adanya praktik kelembagaan yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kinerja organisasi Badan Permasyarakatan Desa tidak semata-mata ditentukan oleh aspek struktural, melainkan juga dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam merespons aspirasi masyarakat, mengelola perbedaan kepentingan, serta menjalankan fungsi pengawasan secara berimbang. Oleh karena itu, kajian mengenai kinerja organisasi Badan Permasyarakatan Desa menjadi penting untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan peran dan fungsi lembaga tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji fenomena kinerja organisasi Badan Permasyarakatan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi musyawarah dalam kelembagaan desa, penyaluran dan penampungan aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap pemerintah desa oleh Badan Permasyarakatan Desa di Desa Cineam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam memperkuat pemahaman mengenai kinerja kelembagaan Badan Permasyarakatan Desa, serta menambah wawasan peneliti terkait praktik kinerja organisasi lembaga perwakilan masyarakat desa.

Tinjauan Pustaka

Badan Permasyarakatan Desa

Badan Permasyarakatan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang memiliki posisi penting dalam struktur pemerintahan desa. Lembaga ini berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam proses perumusan dan pembahasan kebijakan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Keberadaan Badan Permasyarakatan Desa mencerminkan penerapan prinsip demokrasi di tingkat desa, di mana masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui wakil-wakilnya.

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah desa, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana Badan Permasyarakatan Desa mampu menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal. Oleh karena itu, kinerja Badan Permasyarakatan Desa menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Organisasi Sektor Publik

Dalam konteks organisasi sektor publik, kinerja dipahami sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kepentingan publik. Kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari aspek administratif, tetapi juga dari sejauh mana organisasi tersebut mampu memberikan manfaat, menjamin akuntabilitas, serta merespons kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kinerja organisasi menjadi instrumen penting untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk pada level pemerintahan desa.

Organisasi sektor publik merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau negara dengan tujuan mengelola kepentingan masyarakat serta menyelenggarakan berbagai layanan publik. Lembaga ini tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan berfokus pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, serta pemenuhan hak-hak warga negara. Seluruh aktivitasnya didukung oleh pendanaan publik, dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta disertai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Menurut Robins dalam (Fahmi, 2013) mengatakan bahwa ; “ Organisasi sektor publik adalah suatu kesatuan sosial yang secara sengaja dibentuk dan dikelola oleh para anggotanya dengan batasan-batasan yang jelas. Di dalam organisasi tersebut, berbagai kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.”.

Sedangkan menurut Mahsun mengemukakan ; “Organisasi sektor publik merupakan lembaga yang memiliki peran dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa, guna memenuhi kepentingan umum. Pendanaan atas layanan tersebut pada umumnya bersumber dari pendapatan negara, khususnya pajak, sementara seluruh aktivitas operasionalnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku”. Organisasi yang bergerak di sektor publik, baik pada tingkat pemerintahan pusat, daerah, maupun pada unit pemerintahan yang lebih kecil, dituntut untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Upaya peningkatan tersebut diperlukan agar proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan utama berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Tuntutan ini muncul karena keberhasilan organisasi publik tidak hanya di nilai dari internal semata, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kinerja Organisasi Sektor Publik

Kinerja organisasi sektor publik pada dasarnya berorientasi pada tujuan yang lebih luas, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperbaiki mutu pelayanan publik yang diterima. Menurut Sembiring (2012) mengemukakan bahwa ; “Kinerja organisasi dapat dipahami sebagai keseluruhan hasil yang dihasilkan oleh suatu organisasi melalui pelaksanaan berbagai program dan aktivitas dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Bagi organisasi, kinerja menggambarkan capaian dari proses kerja sama antaranggota atau unsur organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan”.

Sementara menurut Hersey at al. dalam (Wibowo, 2013) menjelaskan bahwa ; “ Kinerja organisasi dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti struktur organisasi, tingkat kompetensi, ketersediaan sumber daya nonmanusia, posisi strategis, serta proses pengelolaan sumber daya manusia. Untuk menghasilkan kinerja yang optimal, organisasi memerlukan perumusan strategi yang tepat, penetapan tujuan yang jelas, serta tingkat integrasi yang kuat antarunsur organisasi. Kinerja pada dasarnya terbentuk dari keterpaduan berbagai faktor yang saling berhubungan dan saling memengaruhi. Tanpa adanya integrasi yang baik di antara faktor-faktor tersebut, upaya mencapai kinerja yang maksimal akan sulit direalisasikan”.

Kinerja organisasi dapat diukur dari tingkat keberhasilannya dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan sebelumnya. Kinerja tersebut mencerminkan kemampuan suatu lembaga dalam mencapai sasaran, mengelola sumber daya yang dimiliki, serta menjaga efektivitas dan efisiensi proses kerja sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal. Dalam konteks organisasi sektor publik, aspek ini menjadi sangat penting karena lembaga publik memiliki tanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan sumber daya yang berasal dari kepentingan

umum. Oleh karena itu, kinerja organisasi sektor publik menunjukkan sejauh mana prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dapat diwujudkan melalui sistem kerja yang terencana dan terkoordinasi secara baik.

Menurut Kumorotomo dalam Pasolong (2019), terdapat sejumlah kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai kinerja organisasi, khususnya organisasi pelayanan publik, yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi
Efisiensi berkaitan dengan kemampuan organisasi pelayanan publik dalam memanfaatkan sumber daya dan faktor-faktor produksi secara optimal, serta mempertimbangkan prinsip rasionalitas ekonomi dalam pelaksanaan kegiatannya.
2. Efektivitas
Efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan organisasi pelayanan publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang berkaitan dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, serta peran organisasi sebagai agen pembangunan.
3. Keadilan
Keadilan menekankan pada bagaimana pelayanan publik dialokasikan dan didistribusikan kepada masyarakat. Melalui kriteria ini dapat dinilai apakah pelayanan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, termasuk kelompok marjinal maupun wilayah yang relatif tertinggal.
4. Daya Tanggap
Berbeda dengan organisasi sektor swasta, organisasi pelayanan publik merupakan representasi peran negara atau pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, lembaga publik dituntut memiliki tingkat responsivitas yang tinggi serta mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka dan transparan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, yang diarahkan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai kinerja organisasi Badan Permasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap proses, peran, serta dinamika kelembagaan Badan Permasyarakatan Desa secara kontekstual berdasarkan realitas empiris yang berlangsung di lapangan. Data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui interaksi peneliti dengan informan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian naratif sesuai dengan fokus kajian.

Penelitian dilaksanakan di Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja dengan mempertimbangkan keterkaitan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung informan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Informan dalam penelitian ini meliputi Ketua Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta tokoh masyarakat yang dinilai memahami pelaksanaan fungsi dan peran Badan Permasyarakatan Desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mencermati aktivitas pemerintahan desa serta pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dari informan, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung berupa arsip, foto, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga informasi yang diperoleh memiliki tingkat konsistensi dan keakuratan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efisiensi Kinerja BPD

Efisiensi dalam kinerja organisasi publik berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi tidak hanya dilihat dari pembagian tugas, tetapi juga dari pengelolaan waktu, koordinasi kerja, serta keterlibatan anggota dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. BPD Desa Cineam telah menerapkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas di antara setiap para anggotanya. Setiap anggota diberikan peran yang sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga pelaksanaan fungsi kelembagaan dapat berjalan secara lebih terfokus dan tidak terpusat pada satu pihak tertentu. Pembagian kerja tersebut menunjukkan adanya upaya pemanfaatan sumber daya organisasi secara terencana, terutama dalam menunjang pelaksanaan fungsi permusyawaratan, penampungan dan peyaluran aspirasi masyarakat, serta kegiatan pengawasan pada jalannya pemerintahan desa. Meskipun demikian, efisiensi kerja BPD belum sepenuhnya didukung oleh sistem manajemen organisasi yang kokoh. Keterbatasan waktu serta kesibukan anggota di luar tanggung jawab kelembagaan mengakibatkan koordinasi internal belum dapat berlangsung secara optimal. Kondisi ini berpengaruh terhadap pelaksanaan rapat, tingkat kehadiran anggota, serta proses pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan seluruh unsur BPD. Dalam praktiknya, efisiensi kerja lebih banyak ditopang oleh fleksibilitas dan penyesuaian mekanisme kerja, bukan oleh pengaturan waktu dan koordinasi yang tersusun secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi telah tersedia, aspek pengelolaan internal masih perlu diperkuat agar efisiensi kerja BPD dapat meningkat secara berkelanjutan.

2. Efektivitas Kinerja BPD

Efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian tujuan organisasi, baik dari segi proses maupun hasil yang diharapkan. Organisasi dikatakan efektif apabila mampu melaksanakan fungsi dan kegiatannya sesuai tujuan yang telah ditetapkan serta menghasilkan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian BPD Desa Cineam menunjukkan keterlibatan yang cukup aktif dalam melaksanakan fungsi permusyawaratan desa. Setiap rencana maupun kebijakan pembangunan desa dibahas melalui forum musyawarah

desa yang melibatkan BPD, pemerintah desa, serta unsur masyarakat. Proses tersebut menunjukkan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan desa tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan dirumuskan melalui mekanisme musyawarah yang mencerminkan kepentingan bersama. BPD Desa Cineam mampu melaksanakan fungsi permusyawaratan dan penyaluran aspirasi masyarakat hingga tahap perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat tidak sekadar diterima secara administratif, tetapi juga diolah melalui mekanisme formal desa, sehingga memiliki peluang untuk diwujudkan dalam kebijakan dan program pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas BPD telah tercermin dalam proses kelembagaan yang berjalan. Meskipun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Tidak semua aspirasi warga dapat direalisasikan secara bersamaan karena keterbatasan anggaran desa serta adanya penetapan skala prioritas dalam pembangunan. Kondisi tersebut memunculkan jarak antara harapan masyarakat dengan kemampuan desa dalam merealisasikan seluruh kebutuhan yang diajukan.

3. Keadilan dalam Pelaksanaan Fungsi BPD

Keadilan dalam perspektif kinerja organisasi publik berkaitan dengan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi serta memperoleh manfaat dari kebijakan dan program yang dilaksanakan. Prinsip keadilan menekankan tidak hanya pada prosedur yang terbuka, tetapi juga pada pemerataan hasil yang dirasakan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian BPD Desa Cineam telah membuka ruang partisipasi yang relatif luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya. Masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui berbagai mekanisme, seperti musyawarah dusun, musyawarah desa, maupun melalui komunikasi langsung dengan anggota BPD. Mekanisme tersebut memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, sehingga secara prosedural prinsip keadilan telah diupayakan. Selain itu, BPD turut berperan dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial agar dilaksanakan secara adil dan tepat sasaran. Aspirasi serta keluhan masyarakat terkait bantuan sosial disalurkan melalui BPD untuk kemudian disampaikan dan dibahas bersama pemerintah desa. Namun, pada tahap pelaksanaan masih terdapat pandangan masyarakat bahwa manfaat pembangunan dan bantuan sosial belum dirasakan secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan secara prosedural telah berjalan, tetapi keadilan secara substantif masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Dengan demikian, kesetaraan dalam mekanisme belum sepenuhnya diikuti oleh kesetaraan dalam hasil yang diterima masyarakat.

4. Daya Tanggap BPD terhadap Aspirasi Masyarakat

Daya tanggap berkaitan dengan kemampuan organisasi publik dalam merespons kebutuhan, aspirasi, dan keluhan masyarakat secara cepat dan tepat. Organisasi yang memiliki daya tanggap baik tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menindaklanjutinya melalui mekanisme yang jelas. Berdasarkan hasil penelitian BPD Desa Cineam menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam merespons berbagai aspirasi dan permasalahan masyarakat. Setiap masukan yang diterima oleh BPD ditindaklanjuti dengan menyampaikannya kepada pemerintah desa serta dibahas melalui forum musyawarah desa. Hal

tersebut menunjukkan bahwa BPD tidak mengesampingkan aspirasi masyarakat dan berupaya menempatkan setiap masukan ke dalam mekanisme formal pengambilan keputusan di tingkat desa. Namun demikian, daya tanggap BPD masih cenderung bersifat prosedural dibandingkan substantif. Kecepatan serta hasil tindak lanjut atas aspirasi masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti keterbatasan anggaran desa, kebijakan pemerintah desa, dan penetapan prioritas pembangunan. Akibatnya, meskipun aspirasi masyarakat telah direspons melalui mekanisme formal, hasil yang dirasakan belum selalu sejalan dengan harapan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tanggap BPD perlu diperkuat, tidak hanya pada tahap respons awal, tetapi juga dalam memastikan keberlanjutan tindak lanjut terhadap setiap aspirasi yang disampaikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa BPD telah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa. Namun demikian, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya mencapai tingkat optimal pada seluruh aspek kinerja kelembagaan. BPD berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pelaksanaan fungsi permusyawaratan, penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan desa. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa BPD tidak hanya berperan secara normatif, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

Dari sisi efisiensi, BPD Desa Cineam telah menerapkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang relatif jelas di antara para anggotanya. Pembagian peran tersebut mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan sekaligus menunjukkan adanya upaya pengelolaan sumber daya organisasi secara terencana. Namun demikian, efisiensi kerja BPD masih dipengaruhi oleh keterbatasan waktu serta kesibukan anggota di luar tanggung jawab kelembagaan, sehingga koordinasi internal dan pelaksanaan kegiatan belum selalu dapat dilakukan secara bersamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi kinerja BPD lebih banyak bergantung pada fleksibilitas individu dan kesepakatan informal dibandingkan dengan penerapan sistem manajemen kerja yang terstruktur.

Pada aspek efektivitas, BPD Desa Cineam memperlihatkan peran yang cukup penting dalam pelaksanaan permusyawaratan desa. Setiap kebijakan serta perencanaan pembangunan desa dibahas melalui forum musyawarah yang melibatkan BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat. Aspirasi warga yang disampaikan melalui BPD dapat ditindaklanjuti hingga masuk ke dalam tahap perencanaan pembangunan desa, seperti pada usulan pembangunan infrastruktur lingkungan. Namun demikian, efektivitas BPD belum sepenuhnya tercermin dalam hasil pembangunan yang dirasakan secara merata oleh masyarakat. Keterbatasan anggaran desa serta penetapan skala prioritas pembangunan menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat realisasi aspirasi masyarakat.

Dari sisi keadilan, BPD Desa Cineam telah membuka ruang partisipasi yang relatif luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya, baik melalui

musyawarah dusun, musyawarah desa, maupun komunikasi langsung dengan anggota BPD. Mekanisme tersebut memungkinkan keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, pada tahap implementasi masih muncul pandangan masyarakat bahwa manfaat pembangunan dan penyaluran bantuan sosial belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan secara prosedural telah berjalan, tetapi keadilan dalam hasil kebijakan masih memerlukan penguatan.

Pada aspek daya tanggap, BPD Desa Cineam memperlihatkan kemampuan yang cukup memadai dalam menerima serta menindaklanjuti aspirasi dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Setiap aspirasi yang masuk dibahas bersama pemerintah desa melalui forum musyawarah desa sebagai mekanisme formal pengambilan keputusan. Namun demikian, daya tanggap tersebut masih lebih bersifat prosedural dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti keterbatasan anggaran desa serta kebijakan penetapan prioritas pembangunan. Oleh karena itu, daya tanggap BPD belum sepenuhnya mampu menjamin percepatan realisasi aspirasi masyarakat. Secara keseluruhan, kinerja organisasi BPD Desa Cineam berada pada kategori cukup baik. BPD telah menjalankan fungsi kelembagaannya dan berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi internal, serta perbaikan kualitas tindak lanjut kebijakan masih diperlukan agar kinerja BPD tidak hanya terlihat pada proses kelembagaan, tetapi juga menghasilkan dampak yang lebih nyata dan merata bagi masyarakat desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cineam, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran Praktis

Badan Permusyawaratan Desa Desa Cineam perlu memperkuat manajemen internal kelembagaan, khususnya dalam pengaturan waktu, koordinasi antaranggota, serta pembagian tugas yang lebih terstruktur. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan efisiensi kerja BPD agar seluruh anggota dapat terlibat secara lebih optimal dalam setiap kegiatan kelembagaan. Selain itu, BPD diharapkan dapat memperkuat perannya dalam mengawal tindak lanjut hasil musyawarah desa, tidak hanya pada tahap pembahasan aspirasi, tetapi juga pada tahap pemantauan pelaksanaan program dan penyampaian informasi perkembangan kebijakan kepada masyarakat secara terbuka.

2. Saran Pengembangan Kebijakan Desa

Pemerintah Desa bersama BPD perlu meningkatkan transparansi dalam penetapan skala prioritas pembangunan dan penyaluran bantuan sosial, terutama dengan memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat mengenai dasar pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk memperkuat prinsip keadilan dan mengurangi persepsi ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

3. Saran Akademik

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kinerja Badan Permusyawaratan Desa dengan cakupan yang lebih luas, baik melalui perbandingan antar desa maupun dengan menambahkan indikator kinerja lainnya. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan pendekatan metodologis yang lebih beragam untuk memperkaya pemahaman mengenai dinamika kelembagaan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Fahmi, I. (2013). *Manajemen sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Febrianka, V. W. (2016). Kinerja koperasi: Studi tentang faktor-faktor penyebab tidak aktifnya Koperasi Gotong Royong Kota Blitar. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(3).
- Hilman, R. (2019). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2).
- Krisdian, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan dana desa di Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2).
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik*. STIM YKPN.
- Mangkunegara, A. P. (2005). *Evaluasi kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiyah, S. A. (2019). Analisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 108–115.
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, V. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan* (1st ed.).
- Sembiring, M. (2012). *Budaya dan kinerja organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinaga, O. S., Hasibuan, A., Efendi, E., Priyojadmiko, E. E., Butarbutar, M., Purba, S., Karwanto, Silalahi, M., Hidayatulloh, A. N., & Muliana, M. (2021). *Manajemen kinerja dalam organisasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Sinambela, L. P. (2012). *Kinerja pegawai: Teori, pengukuran, dan implikasi*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2010). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Kencana.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen publik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wibowo. (2013). *Manajemen kinerja*. RajaGrafindo Persada.